

## PENGAJIAN USAHA MIKRO DI INDONESIA (2004)

Pemberlakuan GATT/WTO telah menimbulkan berbagai kerugian terhadap ekonomi makro di banyak negara berkembang. GATT/WTO dapat menimbulkan dampak negatif bagi sektor industri manufaktur terutama pada industri yang tidak efisien atau tidak memiliki daya saing yang tinggi. Kelompok usaha kecil dan menengah merupakan salah satu bagian dari sektor industri yang menerima dampak negatif langsung. Hal ini karena umumnya UKM di Indonesia masih mengalami berbagai kendala, seperti rendahnya kualitas SDM, keterbatasan teknologi, dan modal investasi. Berdasarkan kriteria BPS, jumlah usaha kecil di Indonesia tahun 2002 sebanyak 40.1195.611 usaha kecil dan 99,99 persen di antaranya merupakan usaha mikro. Atas dasar potensi dan karakteristik tersebut, maka pemberdayaan usaha kecil dan mikro dinilai masih strategis dan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Peran strategis tersebut antara lain: a) jumlah yang sangat banyak dari usaha kecil berpotensi menciptakan lapangan kerja yang luas, b) kontribusi usaha kecil terhadap PDB 63,11%, dan c) usaha kecil merupakan pelaku utama yang berinteraksi dengan konsumen akhir.

Berbagai kendala dan masalah masih banyak melekat pada usaha kecil dan mikro. Karena itu, kajian tentang usaha kecil dan mikro perlu dilakukan dengan tujuan: a) mengetahui profil usaha mikro di Indonesia, b) mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro, dan c) menyusun model pengembangan usaha mikro yang bersifat aplikatif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi, terutama dalam merumuskan kebijakan pengembangan usaha mikro.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah menggunakan metode survai. Data primer diambil berdasarkan hasil wawancara menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder berasal dari referensi, laporan hasil kajian terdahulu, dokumen dan publikasi dari instansi terkait.

Hasil kajian menunjukkan perkembangan usaha mikro di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan usaha mikro yang mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Peran usaha kecil dan mikro yang sangat besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja. Kontribusi UKM terhadap PDB pada tahun 2003 sebesar 56,7% dari total PDB nasional, terdiri dari kontribusi usaha mikro dan kecil sebesar 41,1% dan skala usaha menengah sebesar 15,6%. Pada tahun yang sama, jumlah usaha mikro kecil menengah sebanyak 42,4 juta unit usaha atau 99,9% dari jumlah seluruh unit usaha dengan bagian terbesarnya berupa usaha skala mikro. Usaha mikro kecil menengah tersebut menyerap lebih dari 79 juta tenaga kerja atau 99,5% dari jumlah tenaga kerja, meliputi usaha mikro dan kecil sebanyak 70,3 juta tenaga kerja, dan menengah sebanyak 8,7 juta tenaga kerja. Ini berarti bahwa usaha mikro kecil menengah berperan besar dalam penyediaan lapangan kerja.

Masalah yang masih dihadapi usaha mikro adalah rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Produktivitas per unit usaha kecil dan mikro selama periode 2000-2003 tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, yaitu usaha mikro dan kecil masih sekitar Rp 4,3 juta per unit, usaha besar telah mencapai Rp 82,6 milyar. Demikian pula dengan perkembangan produktivitas, tenaga kerja usaha mikro dan kecil serta usaha menengah belum menunjukkan perkembangan yang berarti, yaitu usaha mikro dan kecil Rp 2,6 juta, dan usaha menengah Rp 8,7 juta, sedangkan produktivitas per tenaga kerja usaha besar telah mencapai Rp 423,0 juta. Kinerja seperti itu berkaitan dengan: a) rendahnya kualitas sumberdaya manusia usaha mikro kecil menengah khususnya di bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran; b) rendahnya kompetensi kewirausahaan usaha mikro kecil dan menengah.

Secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik seperti: a) sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar; b) marjin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi; c) modal terbatas; d) pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih terbatas; e) skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan penekanan biaya untuk mencapai efisiensi jangka panjang; f) kemampuan pemasaran dan negosiasi terbatas; g) kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah karena keterbatasan sistem administrasi.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha kecil mengisyaratkan adanya kelemahan-kelemahan yang potensial menimbulkan masalah. Hal ini telah menyebabkan berbagai masalah internal, terutama berkaitan dengan pendanaan, walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kemudahan dengan paket-paket kebijakan untuk mendorong sektor usaha kecil tersebut. Atas dasar potensi dan karakteristik tersebut, maka pemberdayaan usaha kecil ini masih strategis dan sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional.

Di samping itu, usaha mikro menghadapi pula faktor-faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan daya saing dan kinerja usaha mikro, yaitu: a) lemahnya sistem pembiayaan dan kurangnya komitmen pemerintah bersama lembaga legislatif terhadap dukungan permodalan usaha mikro, sehingga keberpihakan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan masih belum seperti yang diharapkan; b) kurangnya kemampuan usaha mikro untuk meningkatkan akses pasar; c) terbatasnya informasi sumber bahan baku dan panjang jaringan distribusi; d) belum terciptanya “*blue print*” platform teknologi dan informasi, yang meliputi masalah regulasi, pembiayaan, standarisasi, lisensi jenis teknologi tepat; e) proses perizinan pendirian badan usaha, paten, merek, hak cipta, investasi, izin yang masih birokratis, biaya tinggi, dan waktu yang lama.

Berdasarkan hasil kajian, dapat dikemukakan beberapa hal yang perlu dicermati dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan pengusaha mikro, antara lain diperlukan pembinaan secara terpadu dari semua unsur terutama dinas-dinas terkait, sehingga usaha mikro dapat berkembang secara berkesinambungan yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah yang berlanjut ke tingkat nasional. Untuk itu, masih perlu dikembangkan upaya untuk meningkatkan akses usaha mikro kepada bank dengan cara: a) mengembangkan sistem kelembagaan perbankan, bank besar harus menjadi lokomotif yang dapat menggandeng bank-bank kecil (BPR) agar dapat meningkatkan pelayanannya kepada pengusaha mikro di daerah; b) penyederhanaan formulir dan sarana pendukung lainnya untuk memberdayakan iklim yang kondusif; c) memanfaatkan keberadaan otonomi daerah untuk menciptakan pola kerjasama antar dinas/instansi terkait dan lembaga penjamin untuk memperluas pembiayaan ke sektor usaha strategis yang berdampak luas; dan d) selama ini usaha mikro tidak mampu mengakses kredit kepada bank, untuk itu, diperlukan adanya lembaga pendamping dalam membantu proses mengakses dana perbankan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan usaha mikro secara optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Untuk lebih mengoptimalkan akses usaha mikro, ada tiga kegiatan layanan keuangan mikro yang disarankan, yaitu: a) memperbaiki akses dari pengusaha mikro kepada layanan dari bank umum; b) meningkatkan efisiensi dan jangkauan dukungan pemerintah terhadap layanan keuangan untuk pengusaha mikro, UKM, dan koperasi; c) memperbaiki akses dari pengusaha mikro, UKM, dan koperasi terhadap layanan keuangan alternatif dan dari lembaga keuangan mikro (LKM).